

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang Tahun 2016-2021 dapat tersusun.

Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Bappeda Kota Semarang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan. Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang ini akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 ini belum sempurna, untuk itu kami mohon masukan dan koreksi dari semua pihak. Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang ini dapat diimplementasikan secara bertahap dengan baik dan konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Semarang, September 2016
KEPALA BAPPEDA KOTA SEMARANG

Ir. BAMBANG HARYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580410 198603 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
 BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.2 LANDASAN HUKUM	I-2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	I-5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
DAERAH KOTA SEMARANG	II-1
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-1
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-1
2.1.2 BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-2
2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-4
2.2.1 APARATUR BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-4
2.2.2 SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-6
2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-9
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG	II-16
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG	III-1
3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	III-4
3.3 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021	III-5
3.4 TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018	III-6
3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS	III-9
3.6 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS	III-10

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KOTA SEMARANG	IV-1
4.1.1	MENINGKATNYA KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-2
4.1.2	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PERENCANA	IV-2
4.1.3	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA PRASARANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN	IV-2
4.2	STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	IV-5
4.2.1	STRATEGI PENINGKATAN KOORDINASI DAN FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG TERINTEGRASI	IV-5
4.2.2	STRATEGI PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR PERENCANA	IV-6
4.2.3	STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS DAN OPTIMALISASI SARANA PRASARANA APARATUR	IV-6
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	V-1
5.1	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	V-1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021.....	VI-1
BAB VII	PENUTUP.....	VII-1

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2016	II-4
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016	II-4
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai / Personil Berdasarkan Golongan / Ruang pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2016	II-5
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai / Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Bappeda Kota Semarang Tahun 2016	II-5
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Semarang Tahun 2015	II-6
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2011-2015	II-10
Tabel 2.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Urusan pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2011-2015	II-14
Tabel 4.1	Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran beserta Target Sasaran Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	IV-3
Tabel 4.2	Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	IV-4
Tabel 4.3	Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	IV-7
Tabel 5.1	Matriks Keterkaitan Permasalahan dengan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	V-1
Tabel 5.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021	V-3
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Bappeda Kota Semarang yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021	VI-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang II-3

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban PD dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Ayat (2) mengamanatkan bahwa “Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2008, dijelaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan. Sementara itu dengan diterbitkannya peraturan perundangan yang baru terkait penyelenggaraan pemerintah daerah, yakni Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Bappeda merupakan salah satu badan di daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Badan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Membantu kepala daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan menyelenggarakan beberapa fungsi, seperti penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, Bappeda berkewajiban menyusun rencana strategis. Rencana strategis ini juga berperan penting dalam mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. Di dalam Undang - undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka perlu disusun perencanaan strategis yakni Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021, yang menggambarkan perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur penunjang urusan pemerintah daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
- 5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- 12) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

- 13) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
- 14) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
- 15) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.
- 16) Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 utamanya adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2016 - 2021 dapat tercapai. Rencana Strategis juga dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. Pada akhirnya Rencana Strategis dapat menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 adalah :

- a. Merencanakan program perencanaan pembangunan yang semakin dinamis;
- b. Mengelola upaya pencapaian keberhasilan organisasi secara sistematis;
- c. Mempermudah pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kota Semarang serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
- d. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan dan meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders);
- e. Menjadi pedoman penyusunan Renja Bappeda.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I akan dibahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SEMARANG

Bab II berisi gambaran umum pelayanan Bappeda Kota Semarang yang memuat tugas, fungsi, dan bagan organisasi; sumber daya dan sarana prasarana aparatur; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kota Semarang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III mendeskripsikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kota Semarang; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; telaahan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021; telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Semarang serta Strategi dan Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

Bab VI berisi indikator kinerja Bappeda Kota Semarang yang mengacu pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, khususnya yang terdapat pada Bab IX RPJMD (Indikator Kinerja Daerah).

BAB VII PENUTUP

Bab VII berisi penutup dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016 - 2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA SEMARANG

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG

2.1.1 Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Semarang

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang yang diperbarui dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pelaksanakan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Penyusunan rencana program di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- e. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam jangka panjang dan jangka menengah serta tahunan;
- f. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dan pelaku pembangunan;
- g. Pelaksanaan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara makro;
- h. Pelaksanaan fasilitasi dan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis / rekomendasi perijinan dan / atau non perijinan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- i. Pengelolaan urusan kesekretariatan Bappeda;

- j. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- k. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bappeda;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang

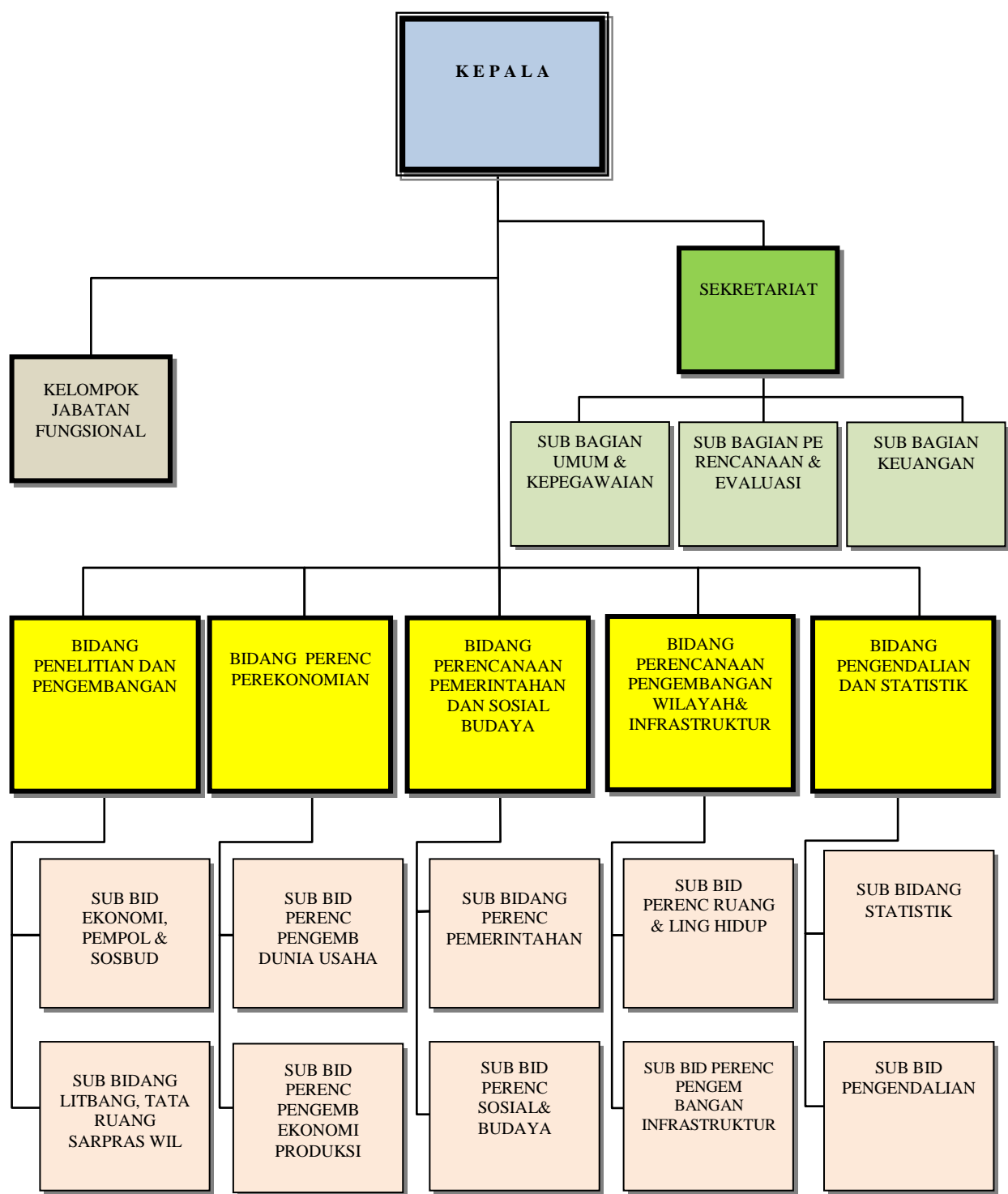
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Badan;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
- 4) Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi Produksi.
- 5) Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Infrastruktur.
- 6) Bidang Pengendalian dan Statistik, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pengendalian;
 - Sub Bidang Statistik.
- 7) Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Pemerintahan, Politik Sosial dan Budaya;
 - Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Tata Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah.

Disamping jabatan struktural tersebut di atas, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan fungsi teknis perencanaan, yang kedudukannya langsung di bawah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk selengkapnya bagan organisasi Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

BAGAN ORGANISASI BAPPEDA KOTA SEMARANG



Gambar 2.1
Bagan Organisasi Bappeda Kota Semarang

2.2 SUMBER DAYA BAPPEDA KOTA SEMARANG

2.2.1 Aparatur Bappeda Kota Semarang

Jumlah pegawai Bappeda Kota Semarang adalah sebanyak 72 orang pegawai, terdiri dari 34 pegawai laki-laki dan 38 pegawai perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai Bappeda didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3 dengan jumlah total sebanyak 88,89 %. Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 11,11 %. Dari komposisi tersebut dapat terlihat bahwa SDM yang ada cukup potensial dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Komposisi pegawai Bappeda berdasarkan jenjang pendidikan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan
pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2016

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Pegawai	Prosentase (%)
1.	S2	23	31,94
2.	S1	38	52,78
3.	D3	3	4,17
4.	SMA	7	9,72
5.	SMP	1	1,39
JUMLAH		72	100,00

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

Dari sisi peningkatan kapasitas SDM aparatur Bappeda, sebanyak 19 pegawai telah mengikuti Diklat Kepemimpinan, dimana secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016

No.	Jenis Diklat Kepemimpinan	Jumlah Pegawai
1.	ADUM / Pim IV	13
2.	SPAMA / Pim III	5
3.	SPAMEN / Pim II	1
JUMLAH		19

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

Dari sisi golongan / ruang dan eselon aparatur Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai / Personil Berdasarkan Golongan / Ruang
pada Bappeda Kota Semarang Tahun 2016

No	Golongan / Ruang	Jumlah Pegawai
1.	IV/c	1
2.	IV/b	1
3.	IV/a	12
4.	III/d	12
5.	III/c	4
6.	III/b	31
7.	III/a	5
8.	II/d	3
9.	II/c	3
JUMLAH		72

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai / Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	13
4.	Fungsional	-
5.	Staf	53
JUMLAH		72

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

2.2.2 Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kota Semarang

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas pada Bappeda Kota Semarang. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi dan peralatan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana
Kantor Bappeda Kota Semarang Tahun 2015

No	Jenis Barang	Jumlah
	Sarana Transportasi	
1	Kendaraan Roda 4	8
2	Kendaraan Roda 2	17
	Sarana Telekomunikasi	
1	Telephone Lokal	11
2	Telephone Langsung	5
3	Faxsimile	3
4	Wireless TOA	2
	Peralatan Kerja	
1	Komputer	37
2	Monitor	10
3	Laptop	50
4	Printer	29
5	Mesin Ketik	13
6	OHP	1
7	LCD Proyektor	11
8	Cassette Recorder	1
9	Panaboard	1
10	Server	1
11	Kamera Digital	12
12	Plotter	1

No	Jenis Barang	Jumlah
13	Screen Motorized	1
14	Layar Proyektor	9
15	Personal Komputer	3
16	Komputer Jaringan	1
17	Perekam	10
18	Handycam	1
19	Kalkulator Casio	1
20	Backdrop Layar	2
21	White Board	3
22	Buku	135
	Perlengkapan Kerja	
1	Meja ½ Biro	17
2	Meja Conter	1
3	Meja Eselon IV	1
4	Meja Rapat Kaca	1
5	Meja Rapat	19
6	Meja Ketik	5
7	Meja Resepsionis	2
8	Meja Samping	20
9	Meja Kursi Tamu	3
10	Meja Komputer	21
11	Meja Pimpinan	1
12	Meja Biro	22
13	Meja Staf	87
14	Kursi Putar	37
15	Kursi Staf	91
16	Kursi Putar Pimpinan	9
17	Kursi Rapat	8
18	Kursi Hadap	9
19	Kursi Lipat	55
20	Kursi Rapat	98
21	Kursi Kerja Pimpinan	3

No	Jenis Barang	Jumlah
22	Almari Buffet	1
23	Alamari buffet Kaca	1
24	Almari Arsip Besar	2
25	Almari Besar Dinding	3
26	Almari Besi	14
27	Almari Gambar	2
28	Almari Pendek Ruang Rapat	2
29	Filling Kabinet Besi	12
30	Filling Cabinet Kayu	8
31	Filing Cabinet Besi (Data File)	1
32	Almari besi Mobile	2
33	UPS	9
34	Troli	2
35	Kulkas/ Lemari Es	1
36	Kabel Audio	160 mt
37	Kipas Angin Berdiri	5
38	Televisi	3
39	TV Plasma 43 Inch	1
40	Rak TV	1
41	AC Unit	5
42	Tangga (B1)	1
43	Dispenser	7
44	N komputing	3
45	Wireless Presenter (Logitec)	5
46	Wireles Portable	2
47	Net Computing L230	2
48	Dri Cabinet	1
49	Penghancur Kertas	1
50	Cash Box	2
51	Brankas	2
52	Jaringan Server	1
53	Maket	19

No	Jenis Barang	Jumlah
54	Ornamen Ruang Rapat	1
55	Ampli Mixer	2
56	Pintu Sekat Rapat	1
57	Mix Meja Sound	4
58	Mix Shure	2
59	Speaker Audio	2
60	Briker Speaker	2

Sumber : Bappeda Kota Semarang, 2016

2.3 KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Penyelenggaraan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka mendukung kinerja pelayanan pada kurun waktu 2010-2015, Bappeda Kota Semarang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan penataan ruang, perencanaan dan statistik. Kinerja pelaksanaan per urusan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Semarang Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sasaran : Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagai bahan acuan bagi stakeholder pembangunan Pemerintah Kota Semarang;																		
	Tersusunnya RPJPD				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Tersusunnya RPJMD				100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	Tersusunnya RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Sasaran : Terciptanya peran serta dan partisipasi masyarakat terhadap proses kesinambungan perencanaan pembangunan																		
	Terciptanya Sarana Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Kota				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	0%	100%
3	Sasaran : Terciptanya tata ruang wilayah yang teratur mengacu pada kebijakan & aturan yang berlaku																		
	Kajian tentang tata ruang wilayah				1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Sasaran : Terciptanya arah pengembangan kota menuju percepatan pembangunan Kota Semarang																		
	Kajian tentang permasalahan kota besar				1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Sasaran : Terkoordinasinya perencanaan prasarana infrastruktur wilayah Kota Semarang																		
	Kajian Bidang Infrastruktur dan Lingk Hidup				3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya kajian-kajian dan penelitian sebagai bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di berbagai bidang;																		
	Kajian bidang Ekonomi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Kajian bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Kualitas kebijakan perencanaan berbasis litbang yg semakin meningkat																		
	Peningkatan kualitas litbang				10 kajian	10 kajian	10 kajian	10 kajian	10 kajian	9 kajian	5 kajian	4 kajian	5 kajian	4 kajian	90%	50%	40%	50%	40%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Semakin berkembangnya jejaring / network mengenai penelitian & pengembangan																		
	Pengembangan Program Litbang dengan lembaga Penelitian				1 kegiatan	-	-	-	-	1 kegiatan	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
9	Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pengelola data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;																		
	Peningkatan kualitas informasi data				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan secara periodik;																		
	Ketersediaan fasilitas informasi untuk perencanaan pembangunan				100%	100%	100%	100%	100%	80%	82,50%	82,50%	90%	95%	80%	82,50%	82,50%	90%	95%
11	Terciptanya koordinasi internal antar bagian yang semakin solid sehingga mampu menunjang kinerja;																		
	Tersedianya sarana adm & sarana prasarana perkantoran sbg penunjang kinerja				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional;																		
	Peningkatan kualitas aparatur perencana				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan di Bappeda																		
	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban yang berkaitan dg keuangan secara efisien dan efektif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Untuk alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program / kegiatan Bappeda Kota Semarang selama 5 tahun (tahun 2011-2015) sebesar Rp 68.331.827.000,- (enam puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Semarang selama 5 tahun (tahun 2011-2015) adalah sebesar Rp 57.939.405.901,- (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima ribu sembilan ratus satu rupiah).

Tabel 2.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pelaksanaan Urusan pada Bappeda Kota Semarang
Tahun 2011-2015

No	Uraian	Anggaran Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG	2.650.000.000	838.500.000	1.147.625.000	445.235.000	1.300.000.000	2.127.691.885	745.643.650	916.988.750	334.807.700	966.236.800	80,29	88,93	79,90	75,20	74,33	24,82	20,78
1.05.15	Program Perencanaan Tata Ruang	950.000.000	750.000.000	1.147.625.000	445.235.000	1.300.000.000	882.002.385	659.370.200	916.988.750	334.807.700	966.236.800	92,84	87,92	79,90	75,20	74,33	40,69	34,73
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1.700.000.000	88.500.000	0	0	0	1.245.689.500	86.273.450	0	0	0	73,28	97,48	0	0	0	-48,70	-48,27
	URUSAN PERENCANAAN	9.679.084.000	11.268.080.000	13.430.042.000	11.449.805.000	13.350.956.000	8.813.038.071	9.278.149.796	10.886.558.258	9.899.000.257	11.322.769.184	91,05	82,34	81,06	86,46	84,81	9,37	6,98
1.06.01.01	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.275.900.000	776.853.000	1.246.650.000	878.069.000	880.782.000	1.207.702.835	585.511.458	679.419.608	629.511.190	411.039.082	94,65	75,37	54,50	71,69	46,67	-1,97	-19,38
1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	277.100.000	365.544.000	1.081.144.000	927.243.000	1.758.371.000	249.704.774	294.391.356	852.330.466	823.418.656	1.465.366.086	90,11	80,54	78,84	88,80	83,34	75,77	70,50
1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya	40.000.000	40.000.000	15.000.000	15.000.000	10.000.000	3.000.000	11.250.000	3.950.000	0	0	7,50	28,13	26,33	0	0	-23,96	27,53

No	Uraian	Anggaran Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.06.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	152.000.000	276.150.000	268.800.000	270.472.400	297.099.000	135.911.115	158.148.100	169.463.500	254.942.650	249.275.350	89,42	57,27	63,04	94,26	83,9	22,37	17,93
1.06.01.15	Program pengembangan data dan informasi	600.000.000	575.000.000	528.875.800	1.018.500.000	1.186.200.000	551.213.697	538.502.323	490.456.238	939.658.543	1.097.943.600	91,87	93,65	92,74	92,26	92,56	24,21	24,30
1.06.01.16	Program kerjasama pembangunan	500.000.000	300.000.000	672.800.000	704.235.000	750.000.000	499.855.045	296.413.300	591.705.451	702.050.590	695.113.594	99,97	98,80	87,95	99,69	92,68	23,86	19,15
1.06.01.19	Program perencanaan pengembangan kota- kota menengah dan besar	1.787.650.000	1.460.000.000	2.300.529.000	1.550.000.000	1.385.000.000	1.569.382.995	1.346.584.200	1.916.671.170	1.456.214.750	1.208.770.380	87,79	92,23	83,31	93,95	87,28	-1,01	-3,22
1.06.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan	257.025.000	405.000.000	350.000.000	200.000.000	554.000.000	194.975.850	328.822.250	254.419.050	181.219.600	278.421.600	75,86	81,19	72,69	90,61	50,26	44,53	17,72
1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	1.800.000.000	2.596.253.000	2.429.631.000	2.132.200.000	3.143.639.000	1.686.861.300	2.281.991.650	2.065.664.475	1.848.689.380	2.755.084.322	93,71	87,90	85,02	86,70	87,64	18,25	16,08
1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	700.000.000	1.358.280.000	1.062.480.000	1.147.200.000	1.247.820.000	641.935.650	1.115.962.359	945.519.700	1.014.614.298	1.189.209.950	91,71	82,16	88,99	88,44	95,3	22,25	20,77
1.06.01.23	Program perencanaan sosial dan budaya	1.939.409.000	3.115.000.000	3.474.132.200	2.606.885.000	2.138.045.000	1.760.938.305	2.320.572.800	2.916.958.600	2.048.680.600	1.972.545.220	90,80	74,50	83,96	78,59	92,26	7,30	6,00
1.06.01.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	350.000.000	0	0	0	0	311.556.505	0	0	0	0	89,02	0	0	0	0	-25,00	-25,00
	URUSAN WAJIB STATISTIK	450.000.000	460.000.000	638.500.000	624.000.000	600.000.000	440.698.590	450.042.060	582.985.030	595.620.320	579.175.550	97,93	97,84	91,31	95,45	98,84	8,73	7,77
1.23.01.15	Program pengembangan	450.000.000	460.000.000	638.500.000	624.000.000	600.000.000	440.698.590	450.042.060	582.985.030	595.620.320	579.175.550	97,93	97,84	91,31	95,45	98,84	8,73	7,77
	J U M L A H	12.779.084.000	12.566.580.000	15.216.167.000	12.519.040.000	15.250.956.000	11.381.428.546	10.473.835.506	12.386.532.038	10.829.428.277	12.868.181.534	89,06	83,35	81,40	86,50	84,38	5,88	4,14

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana urusan wajib perencanaan sudah tidak ada dalam urusan wajib maupun pilihan. Bappeda berubah menjadi unsur penunjang pemerintahan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Tantangan yang akan dihadapi oleh Bappeda Kota Semarang dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

- 1) Dinamika regulasi dari Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme perencanaan pembangunan, serta aspirasi dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam;
- 3) Perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi yang sangat dinamis;
- 4) Perkembangan Kota Semarang dan daerah hinterlandnya.

Peluang dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah adalah antara lain sebagai berikut :

1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah;
2. Tersedianya potensi SDM Aparatur perencana;
3. Kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Ketersediaan sarpras yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Untuk menentukan isu strategis, didahului dengan melakukan identifikasi permasalahan, yaitu permasalahan pokok sampai dengan akar permasalahannya. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga / institusi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Bappeda dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA KOTA SEMARANG

Perumusan arah kebijakan dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah, dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Dengan arah kebijakan diperoleh strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran.

Selanjutnya melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang inherent (berhubungan erat).

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program ini dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang di dalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis. Hal ini merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dan atau bersama masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kelancaran dan keberhasilan perencanaan pembangunan selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (tahun 2011-2015) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas utama Bappeda, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sebagai berikut :

a. Perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah

Kebijakan perencanaan dan penganggaran belum dipandang sebagai satu kesatuan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Paradigma perencanaan pembangunan di Indonesia dikenal dengan istilah money follow function, yakni anggaran mengikuti tugas dan fungsi. Ini artinya, setiap tugas dan fungsi perangkat daerah akan diberi anggaran untuk melaksanakannya. Akibat pendekatan ini, banyak sekali program yang tumpang tindih. Kondisi tersebut membuat anggaran untuk satu program harus dibagi ke beberapa perangkat daerah, sehingga manfaat dari program menjadi kurang signifikan.

Pemerintah Daerah harus mengubah pola penganggaran, yang semula disusun mengikuti tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, menjadi berbasis program. Dengan begitu, kemanfaatan program lebih optimal dan terhindar dari tumpang tindih.

Permasalahan lain yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang yang masih mengemuka sampai dengan saat ini adalah belum selarasnya dokumen perencanaan satu dengan lainnya, sehingga terjadi tumpang tindih kebijakan, yang diimplementasikan dalam program kegiatan antar perangkat daerah.

Disamping itu penggunaan data informasi sebagai basis perencanaan serta hasil pengendalian dan evaluasi belum dijadikan rujukan sepenuhnya dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Dari masalah pokok “perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah”, maka akar masalah adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian antar dokumen perencanaan;
- 2) Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi;
- 4) Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan.

b. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan

Peran Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah dituntut memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, yang salah satunya tercermin dari kapasitas SDM perencana yang dimiliki, disamping sarana prasarana pendukung yang cukup. Kapasitas SDM perencana harus memiliki kemampuan untuk merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh program pembangunan daerah.

Dari masalah “perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan”, maka akar masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Kapasitas SDM perencana belum memadai
- 2) Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
- 3) Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja
- 4) Belum tersedianya SOP Perencanaan Pembangunan

Dari uraian dua permasalahan di atas, yaitu perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan kapasitas kelembagaan, dapat dirangkum bahwa permasalahan pokok dari Bappeda Kota Semarang adalah “**belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah**”.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Walikota Semarang dan Wakil Walikota Semarang Periode Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah :

“SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT
MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA”

Visi tersebut memiliki elemen utama pembangunan untuk mewujudkan Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yaitu **hebat** dan **sejahtera**.



Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam perdagangan dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Hebat mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang semakin sejahtera dalam rangka mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan perdagangan dan jasa.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kota Semarang menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkanlah misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

- 1) **Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas;**
- 2) **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;**
- 3) **Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang Berkelanjutan;**
- 4) **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Daya Saing Berbasis Potensi Lokal.**

Dari Visi - Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, Bappeda merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Visi - Misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang, maka dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2016-2021.

3.3 TELAAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki Bappeda Kota Semarang.

Telaah terhadap RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

- 1) Pada RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator pencapaian pembangunan Kota Semarang yang terdiri dari 13 tujuan, 23 sasaran dan 34 indikator kinerja sasaran yang terukur setiap tahunnya dalam kerangka pencapaian visi dan misi.
- 2) Dalam kerangka kesinambungan pembangunan tiap tahunnya, pada RPJMD Kota Semarang 2016 - 2021 telah dirumuskan agenda atau tema pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap, yakni :
 - Tahun 2017 : dengan tema pembangunan “Penyiapan infrastruktur untuk mendukung kota metropolitan yang sejahtera dan melayani”;
 - Tahun 2018 : dengan tema pembangunan “Pengembangan infrastruktur untuk memecahkan masalah besar perkotaan dan daya saing SDM”;

- Tahun 2019 : dengan tema pembangunan “Penguatan struktur ekonomi didukung oleh peningkatan sektor perdagangan dan jasa”;
 - Tahun 2020 : dengan tema pembangunan “Pemantapan Semarang sehat, cerdas, tangguh, melayani dan berdaya saing”;
 - Tahun 2021 : dengan tema pembangunan “Perwujudan Semarang Hebat”;
- 3) Untuk efektifitas pelaksanaan pembangunan Kota Semarang Tahun 2016-2021 pada RPJMD telah dirumuskan arah pembangunan Kota Semarang dan rumusan program pembangunan sebanyak 63 program, disertai dengan pagu indikatif dan indikator capaian target pada setiap tahunnya yang tersebar di seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 4) Penjabaran RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya disusun melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Dari uraian tersebut di atas, Bappeda Kota Semarang memiliki tugas yang sangat strategis dalam pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang. Peran strategis Bappeda untuk mencapai visi dan misi RPJMD Kota Semarang terutama dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus mempedomani tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, serta melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

3.4 TELAAHAN RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Adapun visi Bappeda yaitu sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan / kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Profesional; pelaksanaan kinerja Bappeda sebagai lembaga perencana yang profesional bermakna kondisi kerja yang didukung oleh SDM dengan kapasitas dan kompetensi yang berkualitas dalam mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga kinerja yang dilakukan dapat terukur dan dipertanggungjawabkan.

Partisipatif; berdasarkan pada paradigma dan ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappeda melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menerapkan asas dan pendekatan partisipatif, yaitu pelibatan peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Inovatif; dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang baru, dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinal serta di luar bingkai konservatif (*out of the box*).

Guna mewujudkan visi Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 di atas, maka dirumuskan 5 (lima) misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat inter-sektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

2) Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerja.

3) Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

- 4) **Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan**
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.
- 5) **Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif**
Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan. Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru.

Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 telah menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya proporsi SDM yang memiliki kompetensi
- 2) Meningkatnya ketepatan dan kecepatan dalam pelaksanaan pekerjaan
- 3) Optimalisasi pengelolaan prasarana dan sarana perkantoran
- 4) Optimalisasi kinerja sistem informasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- 5) Optimalisasi penyediaan data dan informasi hasil pembangunan yang lebih cepat (realtime) dan akurat untuk kepentingan perencanaan dan pengendalian pembangunan
- 6) Sinerginya perencanaan pembangunan Provinsi dengan perencanaan pembangunan nasional dan Kabupaten/Kota
- 7) Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
- 8) Optimalisasi koordinasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
- 9) Optimalisasi kualitas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, baik dalam program maupun kegiatan tidak menyebutkan secara spesifik lokasi / sasaran wilayah kabupaten / kota di Jawa Tengah.

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaah pada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Potensi pengembangan kawasan / wilayah, berdasarkan deskriptif karakteristik wilayah dan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang adalah sebagai berikut :

- 1) Kawasan Perdagangan dan Jasa;
- 2) Kawasan Permukiman;
- 3) Kawasan Pendidikan;
- 4) Kawasan Pemerintahan dan Perkantoran;
- 5) Kawasan Industri;
- 6) Kawasan Olahraga;
- 7) Kawasan Wisata/Rekreasi;
- 8) Kawasan Perumahan dan Permukiman;
- 9) Kawasan Pemakaman Umum;
- 10) Kawasan Khusus;
- 11) Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).

Faktor-faktor pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah terhadap implikasi RTRW dan Lingkungan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya arah pengembangan kawasan / wilayah sebagaimana RTRW, dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan kota;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- 3) Pemberdayaan SDM dan SDA Kota Semarang yang terus dilakukan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :

- 1) Perubahan alih fungsi lahan yang tidak memperhatikan RTRW;
- 2) Pembangunan wilayah / kawasan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 3) Belum optimalnya publikasi informasi rencana kawasan / wilayah;
- 4) Masih lemahnya tindak pengawasan dan pelaksanaan sanksi terhadap bentuk pelanggaran.

3.6 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil-hasil telaahan tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan Bappeda Kota Semarang sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Rumusan isu strategis Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Sinkronisasi rumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Data dan informasi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) Kualitas monitoring dan evaluasi program / kegiatan pembangunan daerah;
- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Perencana;
- 5) Teknologi informasi komunikasi perencanaan pembangunan daerah;
- 6) Kualitas dan kuantitas sarana prasarana kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Bappeda. Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KOTA SEMARANG

Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kota Semarang, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan utama dari Bappeda Kota Semarang adalah **mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021.** Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut.

4.1.1 Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran **Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan**, dengan indikator sasaran :

- 1) Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan;
- 2) Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan;
- 3) Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan;
- 4) Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan;
- 5) Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan.

4.1.2 Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran **Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Perencana**, dengan indikator sasaran : Fasilitasi peningkatan capacity building sumber daya aparatur perencana.

4.1.3 Tujuan 3 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran **Tertib Pengelolaan Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran**; dengan indikator sasaran :

- a. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Matriks Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran beserta Target Sasaran
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	1. Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			2. Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			3. Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	%	99,12	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,60
			4. Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			5. Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur perencana	Fasilitasi peningkatan capacity building sumber daya aparatur perencana	%	40,00	50,00	60,00	70,00	75,00	80,00	80,00
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran	Tertib pengelolaan penyelenggaraan administrasi dan perkantoran	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah	%	80,00	83,00	86,00	89,00	92,00	95,00	95,00
			2. Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	%	75,00	79,00	83,00	87,00	91,00	95,00	95,00

Dari tujuan dan sasaran tersebut di atas, yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah :

Tabel 4.2
Matriks Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUNAN						TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	1. Kesesuaian program di RPJMD dengan program di RKPD tahunan	Prosentase kesesuaian program RKPD tahunan terhadap RPJMD	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Kesesuaian program di RKPD tahunan dengan program di APBD tahunan	Prosentase kesesuaian program APBD tahunan terhadap RKPD tahunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	Prosentase kesesuaian kegiatan APBD tahunan terhadap RKPD tahunan	%	99,12	99,20	99,30	99,40	99,50	99,60	99,60
		4. Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Prosentase ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan terhadap jadwal sesuai ketentuan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5. Ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan pembangunan	Prosentase ketepatan pelaksanaan tahapan penyusunan perencanaan terhadap target tahapan penyusunan perencanaan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Sebagai upaya efektivitas penyelenggaraan pembangunan agar lebih fokus dalam kerangka pencapaian indikator target tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Kota Semarang, maka perlu dirumuskan strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Strategi dan kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda, dalam mengemban tugas dan kewenangannya. Bappeda harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan, dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi dan arah kebijakan yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang tahun 2016 - 2021 dirumuskan sebagai berikut :

4.2.1 Strategi Pengoptimalan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan

Strategi Pengoptimalan Koordinasi, Fasilitasi dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan merupakan upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan”, dengan sasaran “Kesesuaian antar Dokumen Perencanaan”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan :

- 1) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
- 2) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
- 3) Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang;
- 4) Meningkatkan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pengendalian serta penyediaan data dan informasi;

- 5) Meningkatkan efektifitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan agenda / waktu yang telah ditetapkan;
- 6) Meningkatkan sinergitas Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyusunan dokumen perencanaan.

4.2.2 Strategi Fasilitasi Peningkatan Capacity Building Sumber Daya Aparatur Perencana

Strategi Fasilitasi Peningkatan Capacity Building Sumber Daya Aparatur Perencana merupakan upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur”, dengan sasaran “Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Perencana”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan :

- 1) Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan;
- 2) Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4.2.3 Strategi Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Pengelolaan Administrasi dan Perkantoran yang Memadai

Strategi Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Pengelolaan Administrasi dan Perkantoran yang Memadai merupakan upaya pencapaian tujuan “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran”, dengan sasaran “Tertib Pengelolaan Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran”.

Untuk mewujudkan strategi di atas dicapai melalui kebijakan :

- 1) Meningkatkan Standar dan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Aparatur;
- 3) Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dari Renstra Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Matriks Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Pengoptimalan koordinasi, fasilitasi dan penyusunan perencanaan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi 3. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang 4. Meningkatkan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pengendalian serta penyediaan data dan informasi 5. Meningkatkan efektifitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan agenda / waktu yang telah ditetapkan 6. Meningkatkan sinergitas Norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) penyusunan dokumen perencanaan
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi dan Kapabilitas Sumber Daya Aparatur Perencana	Fasilitasi Peningkatan Capacity Building Sumber Daya Aparatur Perencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	Tertib Pengelolaan Penyelenggaraan Administrasi dan Perkantoran	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Sistem Pengelolaan Administrasi dan Perkantoran yang Memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Standar dan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Aparatur 3. Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Dari hasil identifikasi dan inventarisasi permasalahan serta akar permasalahan pada Bappeda Kota Semarang, maka perlu disusun program dan kegiatan untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada permasalahan dan akar permasalahan yang tidak terselesaikan secara tuntas. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegiatan yang muncul tanpa ada dasar permasalahan.

Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara permasalahan dan program kegiatan Bappeda Kota Semarang dalam kurun waktu tahun 2016-2021, dalam dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1

Matriks Keterkaitan Permasalahan dengan Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Kota Semarang tahun 2016-2021

PERMASALAHAN POKOK	AKAR PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
Perlunya peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Kesesuaian antar dokumen perencanaan- Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan- Belum optimalnya pemanfaatan pengendalian dan evaluasi- Belum optimalnya pemenuhan data informasi kebutuhan perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
				Koordinasi Perencanaan Pemerintahan
				Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
				Pendampingan Kegiatan PPRG
				koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua
				Fasilitasi Monitoring GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium)
				Rencana Induk Ketenagakerjaan
				Rencana Aksi Ketenagakerjaan
				Penandaan Warga Miskin
		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Smart City
				Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
				Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah
				Penyusunan Masterplan Pengembangan EKOWISATA
				Perencanaan Pengembangan Eko Techno Park
		<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan tata ruang	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur
				Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
			Program Perencanaan Pembangunan Tata Ruang	Koordinasi Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
				Evaluasi RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031
				Koordinasi Perencanaan Techno Park
				Perencanaan pembangunan Perkotaan
			Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur
				Penyusunan RP2KPKP dan Evaluasi Penanggulangan Kumuh
				Replikasi Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas
				Masterplan Air Limbah
				Review masterplan persampahan
				Review masterplan drainase
				Study Kelayakan Kawasan Kampung Bahari
				Kajian Aspek Sosial Banjir Kanal Timur
				Penyusunan Rencana Pembangunan Investarsi Infrastruktur Jangka Menengah
				RIS Tansportasi Kota Semarang

PERMASALAHAN POKOK	AKAR PERMASALAHAN	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
		- Meningkatkan koordinasi penelitian, pengembangan, evaluasi dan pengendalian serta penyediaan data dan informasi	Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
				Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian
				Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring dan E-Office Berbasis Web
				Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Bantuan Keuangan
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga
				Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Semarang
			Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian
				Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
		- Meningkatkan efektifitas sumber daya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan agenda / waktu yang telah ditetapkan	Program Kerjasama Pembangunan	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
				Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
				Penyelenggaraan Musrenbang
				Penyusunan RKPD
				Penyusunan dan Pembahasan KUAPPAS
				Penyusunan Perda RPJMD
				Review dan Revisi Perda RPJMD
				Penguatan Sistem Inovasi Daerah (sida) Kota Semarang
Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan	- Kapasitas SDM perencanaan belum memadai	- Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur perencana dan penunjang perencanaan pembangunan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis terkait Perencanaan Pembangunan
		- Meningkatkan kapabilitas sumber daya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Program Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan dan penunjang perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan Kualitas Sumber daya manusia perencanaan
				Fasilitasi dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah
		- Meningkatkan Standar dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
				Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
				Penyediaan Alat Tulis Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
		- Penyediaan dan Optimalisasi Sarana Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana prasarana Aparatur	Penyediaan Makanan dan Minuman
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		- Meningkatkan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional
				Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Pengadaan kendaraan dinas / operasional
				Pemeliharaan Sistem Perencanaan, Monitoring dan E-Office Berbasis Web
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
	- Belum tersedianya SOP Perencanaan Pembangunan	- Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah		Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
				Penyusunan LAKIP
				Penyusunan Renstra SKPD
				Penyusunan LKPJ SKPD
				Penyusunan Renja SKPD
				Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
				Review dan Revisi Renstra PD

Dari rencana program dan kegiatan tersebut di atas, dilakukan pentahapan pencapaian target kinerja program dan kegiatan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAPPEDA KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
								Kinerja	Rp	2017		2018		2019		2020		2021		AKHIR PERIODE RENSTRA	
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14	15,00	16	17,00	18	19,00	20	21,00	22
I. URUSAN WAJIB																					
B. URUSAN NON PELAYANAN DASAR																					
14. URUSAN STATISTIK																					
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Kesesuaian antar dokumen perencanaan		2.14.15	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah	Tingkat ketersediaan data statistik pembangunan daerah	%			78,00	534.000.000	80,00	483.345.000	82,00	506.991.000	84,00	581.574.000	86,00	602.199.000	86,00	2.708.109.000
					Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Ketersediaan Data Statistik Daerah (12 Jenis Data)	Dokumen / Tahun			12	534.000.000	12	483.345.000	12	506.991.000	12	581.574.000	12	602.199.000	12	2.708.109.000
III. FUNGSI PENUNJANG																					
1. PERENCANAAN																					
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan dengan kegiatan di APBD tahunan	4.01.23	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jenis Koordinasi	12,00	2.165.000.000	13,00	1.796.500.000	13,00	2.024.182.000	14,00	2.254.990.000	14,00	2.845.392.000	15,00	3.132.902.000	15,00	12.053.966.000
					Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	Kesesuaian Perencanaan Kegiatan Urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan PPA, Pengendalian Penduduk dan KB, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Perpustakaan, Transmigrasi (antara RKPD dengan APBD)	%	99,12	500.000.000	99,20	500.000.000	99,30	600.000.000	99,40	654.990.000	99,50	750.000.000	99,60	850.000.000	99,60	3.354.990.000
					Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	Kesesuaian perencanaan Kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pertanahan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, Kearsipan, Kominfo, Persandian, dan Urusan Penunjang (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Diklat, Litbang) dan Fungsi lain (Setda, Inspektorat dan kecamatan) dan pemerintahan umum (Kesbangpol) antara RKPD dengan APBD	%	99,12	400.000.000	99,20	400.000.000	99,30	400.000.000	99,40	450.000.000	99,50	550.000.000	99,60	600.000.000	99,60	2.400.000.000
					Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Dokumen penanggulangan kemiskinan daerah	dokumen / laporan	2	350.000.000	2	400.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	2	650.000.000	2	700.000.000	12	2.800.000.000
					Pendampingan Kegiatan PPRG	Dokumen Pembangunan Responsif gender	dokumen / laporan			2	200.000.000	2	174.182.000	2	200.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	10	1.074.182.000
					koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua	Dokumen PUS	dokumen / laporan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	6	325.000.000
					Fasilitasi Monitoring GAKY (Gangguan Akibat Kekurangan Yodium)	Dokumen monitoring gaky	dokumen / laporan	1	15.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	120.000.000	1	150.000.000	6	420.000.000
					Rencana Induk Ketenagakerjaan	Dokumen Rencana Induk Ketenagakerjaan	dokumen	1	250.000.000											1	0
					Rencana Aksi Ketenagakerjaan	Dokumen Aksi Tahunan dan Monev	dokumen			2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	700.000.000
					Penandaan Warga Miskin	Jumlah gakin teridentifikasi	%	20,82	600.000.000											20,82	0
					Koordinasi Perencanaan Smart City	Dokumen Aksi Tahunan dan Monev smart city	dokumen			2	96.500.000	2	150.000.000	2	200.000.000	2	250.392.000	2	282.902.000	10	979.794.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2017		2018		2019		2020		2021		AKHIR PERIODE RENSTRA	
								Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14	15,00	16	17,00	18	19,00	20	21,00	22
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi dan perkantoran	Tertib pengelolaan penyelenggaraan administrasi dan perkantoran	- Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan perencanaan pembangunan daerah - Tersedianya integrasi sistem penunjang perencanaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100,00	774.700.000	100,00	2.103.326.000	100,00	983.228.000	100,00	1.095.342.000	100,00	1.520.335.000	100,00	1.383.436.000	100,00	7.085.667.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya langganan telepon dan koran (5 telpon, 4 koran)	Bulan / Tahun	12	43.200.000	12	45.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	165.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Pemenuhan pajak kendaraan bermotor (17 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4 yang terbayar)	Unit / Tahun	25	20.000.000	25	20.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	25.000.000	25	120.000.000
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Pemenuhan Biaya pemeliharaan dan penggantian suku cadang peralatan kerja	Unit	50	25.000.000	50	25.000.000	50	22.500.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	300	107.500.000
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor dan benda pos	Unit	2.794	65.000.000	2.794	65.000.000	2.794	66.000.000	2.794	67.000.000	2.794	68.000.000	2.794	69.000.000	16.764	335.000.000
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan cetakan dan penggandaan	Unit	118.324	46.000.000	118.324	46.000.000	118.324	48.000.000	118.324	50.000.000	118.324	52.000.000	118.324	54.000.000	709.944	250.000.000
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Pemenuhan alat-alat listrik dan ongkosnya	Unit	196	10.000.000	196	5.000.000	196	6.000.000	196	6.000.000	196	6.000.000	196	2.000.000	1.176	25.000.000
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pemenuhan peralatan rumah tangga	Unit	639	15.000.000	639	15.000.000	639	16.000.000	639	17.000.000	639	18.000.000	639	19.000.000	3.834	85.000.000
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Eksemplar	10	3.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	60	5.000.000
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Pemenuhan konsumsi rapat, tamu dan pegawai	Kali	60	47.500.000	65	47.500.000	70	50.000.000	75	52.500.000	80	55.000.000	85	57.500.000	435	262.500.000
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Pemenuhan biaya Koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan	Kunjungan	65	475.000.000	200	1.665.592.000	80	668.728.000	90	771.842.000	200	1.189.335.000	100	1.048.936.000	735	5.344.433.000
					Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Pemenuhan uang lembur	Jam	300	25.000.000	1.200	168.234.000	250	50.000.000	250	55.000.000	250	56.000.000	250	57.000.000	2.500	386.234.000
				4.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100,00	335.720.000	100,00	389.000.000	100,00	273.435.000	100,00	304.614.000	100,00	384.368.000	100,00	423.206.000	100,00	1.774.623.000
					Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Pemenuhan biaya service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas / operasional (jumlah kendaraan roda 2 dan 4 yang terbayar)	Unit / Tahun	25	250.000.000	25	275.000.000	25	209.435.000	25	275.000.000	25	277.000.000	26	230.206.000	26	1.266.641.000
					Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer	Pemenuhan service mebeluer	Unit	30	10.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	2.000.000	30	3.000.000	150	11.000.000
					Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	8	75.720.000	10	100.000.000	2	50.000.000	2	15.614.000	10	90.368.000			32	255.982.000
					Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Pemenuhan kendaraan operasional kantor	Unit										1	175.000.000	1	175.000.000	
					Pemeliharaan Sistem Perencanaan, Monitoring dan E-Office Berbasis Web	Operasional sistem e- office dan website Bappeda Kota Semarang	unit / tahun			3	12.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	66.000.000
				4.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100,00	420.170.000	100,00	264.000.000	100,00	293.184.000	100,00	326.614.000	100,00	412.128.000	100,00	453.772.000	100,00	1.749.698.000
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemenuhan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	1	20.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	6	30.000.000
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Pemenuhan laporan keuangan	Dokumen	1	12.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	6	30.000.000
					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pemenuhan laporan prognosi realisasi anggaran	Dokumen	1	12.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	6	30.000.000
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	20.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	6	30.000.000
					Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Pemenuhan dokumen RKA, DPA dan DPPA	Dokumen	2	14.890.000	2	4.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	12	30.000.000
					Penyusunan LAKIP	Pemenuhan LAKIP Bappeda	Dokumen	1	22.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	6	30.000.000
					Penyusunan Renstra SKPD	Pemenuhan Renstra Bappeda	Dokumen	1	40.000.000								1	8.000.000	2	8.000.000	
					Penyusunan LKPJ SKPD	Pemenuhan LKPJ Bappeda	Dokumen	1	20.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	6	30.000.000
					Penyusunan Renja SKPD	Pemenuhan Draf Renja dan Renja Bappeda	Dokumen	2	20.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	7	30.000.000
					Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Pemenuhan Laporan pertanggungjawaban keuangan	Dokumen	12	239.280.000	12	228.000.000	12	253.184.000	12	272.614.000	12	356.128.000	12	373.772.000	60	1.483.698.000
					Review dan Revisi Renstra PD	Pemenuhan review renstra Bappeda	Dokumen	1		1	4.000.000			1	6.000.000			1	8.000.000	4	18.000.000
JUMLAH									15.024.400.000		12.745.716.000		13.280.123.000		14.773.418.000		18.703.399.000		20.098.003.000		79.600.659.000

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Dasar		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
										2017		2018		2019		2020		2021		AKHIR PERIODE RENSTRA	
										Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00	12	13,00	14	15,00	16	17,00	18	19,00	20	21,00	22
4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																					
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Kesesuaian antar dokumen perencanaan		4.04.15	Program Penelitian dan Pengembangan	Cakupan pengkoordinasian dan fasilitasi perencanaan Perangkat Daerah bidang Tata Ruang dan Infrastruktur, ekonomi, pemerintahan dan sosbud	Dokumen	5		5	715.340.000	8	1.073.010.000	10	1.609.515.000	12	2.414.273.000	14	3.621.410.000	54	9.433.548.000
					Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga	Kajian penelitian dan tersosialisasikannya hasil-hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan pembangunan Kota Semarang	Dokumen			5	293.370.000	8	566.140.000	10	989.515.000	12	1.614.273.000	14	2.071.190.000	54	5.534.488.000
					Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kota Semarang	Koordinasi penguatan SIDA	Dokumen			1	71.970.000	1	150.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	600.000.000	6	1.421.970.000
						Jumlah Dokumen pendukung SIDA (Tata laksana penguatan SIDA (2017), Kajian pengembangan technopark (2018), Review roadmap penguatan SIDA (2019), Rencana Aksi Pengembangan SIDA Kota Semarang (2020), Raperwal Pengembangan SIDA Kota Semarang (2021))	Dokumen			1		1		1		1		1		6	
						Capacity Building SIDA (diseminasi dan workshop)	Dokumen / Laporan			1		1		1		1		6		6	
					Dokumentasi dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian	Jumlah dokumen penyelenggaraan pameran, penerbitan jurnal, lomba krenova dan sosialisasi	Dokumen			4	350.000.000	4	356.870.000	4	370.000.000	4	450.000.000	4	950.220.000	20	2.477.090.000

BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA KOTA SEMARANG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 diharapkan mampu memberikan arah perencanaan pembangunan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, penyelenggaraan pemerintah dapat selaras dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akutabilitas kinerja.

Perencanaan strategis Bappeda Kota Semarang tahun 2016-2021 dirumuskan dengan mengacu pada program-program RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan tugas dan fungsi Bappeda. Dalam pelaksanaannya diharapkan dapat mewujudkan kinerja pelayanan Bappeda Kota Semarang dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

Indikator kinerja adalah uraian singkat dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, indikator kinerja dimaknai sebagai perwujudan dari pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2016-2021, indikator kinerja yang menjadi tugas dan kewenangan Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bappeda Kota Semarang
yang Mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Target Kinerja pada Akhir RPJMD
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Kesesuaian Program di RPJMD tahunan dengan Program di RKPD Tahunan	%	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2.	Kesesuaian Program di RKPD tahunan dengan Program APBD Tahunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan pelayanan kepada pelaku pembangunan.

Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang selama periode tahun 2016-2021. Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 merupakan implementasi program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Semarang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Program kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Bappeda harus tertuang dalam Renja Bappeda sesuai pentahapannya, sedangkan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Diharapkan Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021 ini akan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.